



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : hubdat@hubdat.web.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : SK.206/KP.801/DJPD/2015**

**TENTANG**

**TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN  
RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2016, diperlukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tim Kelompok Kerja Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5178);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Tahun 2015;
13. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penelitian dan Review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: KU. 001/2/17 PHB 2014 tanggal 24 Nopember Tahun 2014 Perihal Persiapan Penyusunan Pagu Kebutuhan Kementerian Perhubungan RKA 2016;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN ANGGARAN 2016.**



- PERTAMA** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2016, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:

Memberikan arahan kepada kelompok kerja penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran pelaksanaan tugas.
  2. Pelaksana:
    - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
    - b. melakukan pengawasan terhadap kelancaran Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
    - c. mengkaji pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
    - d. menyiapkan segala bentuk administrasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
  3. Anggota Tim Penyusun dan Pembahas:
    - a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua terkait dengan pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
    - b. menyusun laporan hasil pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
    - c. melaporkan hasil pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Ketua.

- KETIGA : Tim kelompok kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA** harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Nomor : SP DIPA-022.03.1.412735/2015 tanggal 14 November 2014 pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 15 Januari 2015

---

**A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal,**

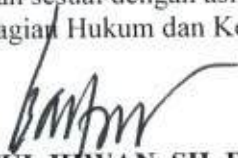
ttd.

**HARY KRISWANTO, SH. DESS**  
**Pembina Tingkat I (IV/d)**  
**NIP. 19631115 199203 1 001**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubdat;
3. Para Kabag di lingkungan Ditjen Hubdat;
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
**BAITUL IHWAN, SH. DESS**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19650317 199103 1 003**

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Nomor : SK.206/KP.801/DJPD/2015  
Tanggal : 15 Januari 2015

**TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN  
RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**I. PENGARAH**

1. Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2. Anggota :
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
  2. Direktur LLAJ
  3. Direktur LLASDP
  4. Direktur BSTP
  5. Direktur KTD

**II. PELAKSANA**

- Ketua : Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Hubdat
- Sekretaris :
  1. Kasubag. Rencana dan Program, Ditjen Hubdat
  2. Kasubag. Pemantauan dan Evaluasi, Ditjen Hubdat

**III. ANGGOTA TIM PENYUSUN DAN PEMBAHAS**

NO.	INSTANSI	UNIT KERJA
1.	Kabag. Hukum dan Kerjasama	Setditjen Hubdat
2.	Kabag. Keuangan	Setditjen Hubdat
3.	Kasubdit. Jaringan Transportasi Jalan	Direktorat LLAJ
4.	Kasubdit. Jaringan Transportasi SDP	Direktorat LLASDP
5.	Kasubdit. Jaringan Transportasi Perkotaan	Direktorat BSTP
6.	Kasubdit. Manajemen Keselamatan	Direktorat KTD
7.	Kasubdit. Lalu Lintas Jalan	Direktorat LLAJ
8.	Kasubdit. Angkutan Jalan	Direktorat LLAJ
9.	Kasubdit. Pelabuhan SDP	Direktorat LLASDP
10.	Kasubdit. Sarana Angkutan SDP	Direktorat LLASDP
11.	Kasubdit. Lalu Lintas SDP	Direktorat LLASDP
12.	Kasubdit. Angkutan SDP	Direktorat LLASDP
13.	Kasubdit. Angkutan Perkotaan	Direktorat BSTP
14.	Kasubdit. Lalu Lintas Perkotaan	Direktorat BSTP
15.	Kasubdit. Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan	Direktorat BSTP
16.	Kasubag. Sistem Informasi dan Pelaporan	Setditjen Hubdat
17.	Kasubag. Pelaksanaan Anggaran	Setditjen Hubdat



NO.	INSTANSI	UNIT KERJA
18.	Kasubag. Perbendaharaan	Setditjen Hubdat
19.	Kasubag. Peraturan Perundang-undangan	Setditjen Hubdat
20.	Kasi. Jaringan Prasarana & Pelayanan	Direktorat LLAJ
21.	Kasi. Pengembangan Transportasi Jalan	Direktorat LLAJ
22.	Kasi. Perlengkapan Jalan	Direktorat LLAJ
23.	Kasi. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Direktorat LLAJ
24.	Kasi. Tarif & Keperintisan	Direktorat LLASDP
25.	Kasi. Rancangan Bangun Pelabuhan	Direktorat LLASDP
26.	Kasi. Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan	Direktorat LLASDP
27.	Kasi. Rancang Bangun Sarana	Direktorat LLASDP
28.	Kasi. Bimbingan Usaha Angkutan	Direktorat LLASDP
29.	Kasi. Pengembangan Jaringan	Direktorat LLASDP
30.	Kasi. Manajemen Lalu Lintas	Direktorat LLASDP
31.	Kasi. Analisa & Evaluasi Jaringan	Direktorat LLASDP
32.	Kasi. Jaringan TP Wil. I	Direktorat BSTP
33.	Kasi. Jaringan TP Wil. II	Direktorat BSTP
34.	Kasi. Angkutan Perkotaan Wil. II	Direktorat BSTP
35.	Kasi. Lalu Lintas Perkotaan Wil. I	Direktorat BSTP
36.	Kasi. Lalu Lintas Perkotaan Wil. II	Direktorat BSTP
37.	Kasi. Pemaduan Moda TP Wil. I	Direktorat BSTP
38.	Kasi. Pemaduan Moda TP Wil. II	Direktorat BSTP
39.	Kasi. Pengembangan Keselamatan	Direktorat KTD
40.	Kasi. Monitoring dan Evaluasi	Direktorat KTD
41.	Kasi. Keselamatan Awak Angkutan Umum	Direktorat KTD
42.	Kasi. Audit Keselamatan	Direktorat KTD
43.	Kasi. Kemitraan Pasal	Direktorat KTD
44.	Oktaviano RA	Setditjen Hubdat
45.	Ihwan Prihanto, SSiT	Setditjen Hubdat
46.	Budi Santoso S.SiT	Setditjen Hubdat
47.	Irly Saritini Permata, M.Sc	Setditjen Hubdat
48.	Victor Basa, ST	Setditjen Hubdat
49.	Angga Dwi W. P, Amd. LLAJ	Setditjen Hubdat
50.	Firman Prayogi, S. ST.	Setditjen Hubdat
51.	Yoyok Harianto	Setditjen Hubdat
52.	Yustinus Danang R.	Setditjen Hubdat
53.	Sari Hayu Hutami	Setditjen Hubdat
54.	Yoseph Yanuar	Setditjen Hubdat
55.	Lilis, AMd.K.AK	Setditjen Hubdat
56.	Dhoni Sutrisno, MT	Direktorat LLAJ
57.	Dluha My Praba, M.Sc	Direktorat LLAJ
58.	Edy Purwanto, S.SiT	Direktorat LLAJ
59.	Riko Hanafi, MT	Direktorat LLAJ
60.	Nirwan Ardi Jaya, SH	Direktorat LLAJ
61.	Ardiansyah, SH	Direktorat LLAJ
62.	Kiki Asriyanto	Direktorat LLAJ
63.	Wisnu Herlambang	Direktorat LLAJ
64.	Adimas Satrio, S.SiT	Direktorat LLAJ
65.	Ari Widi Wibowo	Direktorat LLAJ
66.	Abdul Madjid, S.SiT	Direktorat LLASDP

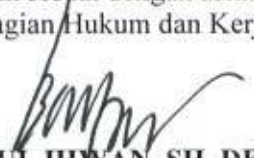
NO.	INSTANSI	UNIT KERJA
67.	Muhammad Fahmi, ST	Direktorat LLASDP
68.	Susmiati Djafar, ST, MT	Direktorat LLASDP
69.	Windi Susilawati, ST, MT	Direktorat LLASDP
70.	Yogi Satrio Prabowo, ST	Direktorat LLASDP
71.	Aminuddin Anhar, ST, MT	Direktorat LLASDP
72.	Devies Citrasari BU, SE	Direktorat LLASDP
73.	Rendra Iman P	Direktorat LLASDP
74.	Indah Novianty, ST	Direktorat LLASDP
75.	Novi Tri Susanto, Amd	Direktorat LLASDP
76.	Yohannes Silaen, M.Sc	Direktorat BSTP
77.	Yudo Hartadi	Direktorat BSTP
78.	M. Samsul Anwar, M.Sc	Direktorat BSTP
79.	Sano Mikael	Direktorat BSTP
80.	Anjar Hermawan	Direktorat BSTP
81.	Andi Putra Jaya, M.Sc	Direktorat BSTP
82.	Hikmat Hidayat Putu, ST	Direktorat BSTP
83.	Muhammad Isrofi, ST	Direktorat BSTP
84.	Bambang Hermanto, MSc	Direktorat KTD
85.	Nawang Wulan D. Ambarwati	Direktorat KTD
86.	Joko Kusnanto, MSc	Direktorat KTD
87.	Said Riesky, SH, MH	Direktorat KTD
88.	Denny Michels Adlan, ST, MM	Biro Perencanaan
89.	Moch Salam Purnama, SE	Biro Perencanaan
90.	Risa Eka Daniria, SE	Biro Perencanaan

**A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal,**

ttd.

**HARY KRISWANTO, SH. DESS**  
**Pembina Tingkat I (IV/d)**  
**NIP. 19631115 199203 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

  
**BAITUL IHYWAN, SH. DESS**  
**Pembina Tingkat I (IV/b)**  
**NIP. 19650317 199103 1 003**